

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ANJING DI KABUPATEN KULON PROGO: STUDI
KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2021/PT YYK

Kiki Novita Sawitri¹, Ariesta Wibisono Anditya²

INTISARI

Penyelundupan anjing tanpa dokumen resmi, terutama untuk konsumsi, semakin marak dan menimbulkan ancaman serius seperti penyebaran penyakit zoonosis, termasuk rabies. Praktik ini melanggar hukum peternakan dan kesehatan hewan, namun penegakannya masih sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan hanya satu kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Wates, yakni Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK. Kasus tersebut menjadi penting karena mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap hewan non-satwa dilindungi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum dalam kasus tersebut serta mengevaluasi peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menangani penyelundupan anjing.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum dan dinas teknis. Fokus utama penelitian adalah pada penerapan hukum dalam kasus penyelundupan anjing dan sejauh mana peran instansi daerah dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak memiliki dokumen kesehatan hewan. Meski Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana, sanksinya dianggap belum cukup menimbulkan efek jera. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah berupaya melalui sosialisasi dan pengawasan, namun masih menghadapi kendala koordinasi dan lemahnya regulasi. Diperlukan penguatan hukum, peningkatan sinergi antar instansi, serta kesadaran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci : *Anjing, Penegakan Hukum, Penyelundupan Hewan, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Analysis of Law Enforcement of Dog Smuggling Crime in Kulon Progo

Regency: Case Study on Decision Number 95/Pid.Sus/2021/PT YYK

Kiki Novita Sawitri³, Ariesta Wibisono Anditya⁴

ABSTRAK

The smuggling of undocumented dogs, especially for consumption, is increasingly prevalent and poses serious threats such as the spread of zoonotic diseases, including rabies. This practice violates animal husbandry and health laws, but enforcement is still very limited. This is evidenced by only one case recorded in the Wates District Court, namely Decision No. 95/Pid.Sus/2021/PT YYK. This case is important because it reflects the weak supervision of non-protected animals. Therefore, this research was conducted to examine law enforcement in the case and evaluate the role of the DIY Agriculture and Food Security Agency in handling dog smuggling.

This research uses an empirical juridical approach, by combining the analysis of laws and regulations and law enforcement practices in the field. Data was collected through literature study and interviews with relevant parties such as law enforcement officials and technical agencies. The main focus of the research is on the application of law in dog smuggling cases and the extent of the role of local agencies in preventing and handling such violations.

The results showed that the smugglers violated the applicable legal provisions because they did not have animal health documents. Although the High Court imposed penalties, the sanctions are considered insufficient to create a deterrent effect. The Department of Agriculture and Food Security of Yogyakarta has made efforts through socialization and supervision, but still faces coordination constraints and weak regulations. Legal strengthening, increased synergy between agencies, and public awareness are needed to support more effective law enforcement.

Keywords: *Dogs, Law Enforcement, Animal Smuggling, Decision Number 95/Pid.Sus/2021/PT YYK.*

¹ Student of Law Study Program (S-1) Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta

² Lecturer of Law Study Program (S-1) Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta